



Telaah Kritis Empat Pilar Kebangsaan

Dr. Mohammad Nasih¹

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :
00262/PERPUS-
KPK/2013

No. Panggil :
A AP 14

1302 00262

Pendahuluan

Negara-bangsa Indonesia lahir dari kebhinnekaan entitas yang ada di wilayah yang disebut nusantara. Perasaan persamaan nasib karena dijajah oleh Belanda kemudian melahirkan keinginan untuk berdaya dengan cara bersatu padu mengalahkan perbedaan yang biasanya menjadi faktor pemicu konflik dengan tujuan untuk memerdekakan diri. Semangat inilah yang kemudian melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi tetap satu). Semboyan ini kemudian dimanifestasikan secara formal dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mempersatukan berbagai entitas keberagaman itu, diperlukan ideologi yang memberikan posisi yang sejajar di antara entitas itu di hadapan negara. Gagasan itu kemudian mendorong para pendiri bangsa melakukan kontemplasi mendalam dan juga perdebatan intelektual yang sangat berkualitas, sehingga kemudian lahir Pancasila sebagai dasar negara yang mengatasi

¹ Mengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ Jakarta Pengurus Dewan Pakar ICMI Pusat

KESIMPULAN :

1. SNI, siap mendukung pelaksanaan program MP3EI dengan dibuktikan melalui tersedianya SNI yang terkait dengan program utama (227 SNI) , 6 koridor (4747 SNI) dan kegiatan ekonomi (3496 SNI).
2. Laboratorium yang mendukung program MP3EI terkait dengan SNI mencapai 456, meski sebarannya masih banyak di pulau Jawa.
3. Yang akan dilakukan setelah temuan ini adalah memperdalam untuk dilakukan analisa tentang SNI yang masih baik, perlu direvisi, bahkan kalau perlu di abolisi.

PUSTAKA :

- United Nations Conference on Environment & Development. AGENDA 21. Chapter 2.2. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992.

seluruh keberagaman suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pancasila menjadi *weltanscauung* yang membuat tidak ada satu pun entitas keberagaman yang ada bisa merasa dan mengklaim diri sebagai lebih superior ayas yang lain. Di depan Pancasila, seluruh entitas keberagaman itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Gagasan-gagasan filosofis yang terdapat dalam dasar negara itu kemudian melahirkan UUD NRI tahun 1945. Karena itu, konstitusi tidak bisa diamandemen secara semena-mena, sehingga menyebabkan orientasinya keluar dari semangat dasar negara, Pancasila.

Walaupun istilah empat pilar sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai jargon daripada kerangka filosofis, karena keempatnya sesungguhnya tidak berposisi setara, tapi perspektif mengenai kaitan antara keempatnya tersebut perlu dipahami dengan baik, terutama oleh para pemimpin bangsa, agar Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa yang selalu mengalami kemajuan secara akseleratif. Pemahaman yang tidak tepat, berpotensi besar mengembalikan Indonesia ke titik nol atau bahkan mengalami defisit, karena modal besar yang telah dimiliki tidak mendapatkan penghargaan yang memadai dan bahkan dihilangkan sama sekali.

Perspektif

Sebelum merdeka, wilayah yang kemudian diberi nama Indonesia telah mengalami penjajahan selama berabad-abad oleh Belanda dan beberapa tahun oleh Jepang. Efek penjajahan tersebut sungguh sangat besar, di samping mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah, juga menyebabkan kelemahan mentalitas sumber daya manusianya. Karena itu, para cerdik pandai yang rata-rata masih berusia muda mengambil inisiatif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan itu dengan cara mempersatukan seluruh entitas yang ada. Inisiatif tersebut mendapat sambutan besar dari seluruh entitas masyarakat yang sangat beragam. Perasaan sebagai sama-sama masyarakat yang dijajah dan semangat untuk mendapatkan kemerdekaan membuat mereka merasa sebagai satu bangsa, walaupun mereka sesungguhnya berbeda SARA. Dalam konteks inilah, mereka dapat memahami dan mempraktikkan makna Bhinneka Tunggal

Ika sebagai bukan hanya “keberagaman dalam persatuan” tetapi juga “persatuan dalam keberagaman”.

Perspektif ini persis dengan pandangan Benedict Anderson yang melihat *nation* sebagai sebuah entitas komunitas yang terbayangkan (*imagined community*). Menurut Anderson:

*”A nation is imagined political community... It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion... The nation is imagined as limited because even the largest of them has finite, if elastic boundaries, beyond which lie other nations... It is imagined as sovereign because the concept was born in an age in which enlightenment and revolution were destroying the legitimacy of the divinely-ordained, hierarchical dynastic realm... Finally, it is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship”.*²

Perspektif dan perasaan yang sama itu memberikan dorongan untuk membangun batas-batas teritorial sebagai prasyarat sebuah negara. Perbatasan tersebut adalah batas-batas geografis wilayah sebuah negara.³ Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pengokohan konsep NKRI.

Berdasarkan keberagaman yang ada dan dipandang sebagai khazanah kekayaan, bukan sebagai faktor pemecah belah, seharusnya bukan “kesatuan” yang menjadi kerangka konsepsi, melainkan “persatuan”. Karena “kesatuan” sesungguhnya mencerminkan adanya pemaksaan terhadap entitas-entitas yang berbeda untuk menghilangkan ciri uniknya. Sedangkan “persatuan” adalah konsepsi yang ramah terhadap perbedaan dalam sebuah ikatan besar untuk menjadikannya dalam wadah yang satu. Namun, istilah “kesatuan” telah dipilih sebagai penanda yang tetap memberikan penghargaan kepada berbagai keunikan yang ada.

² Benedict Anderson, *Imagined Communities; Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, London-New York: Verso, 1995, hal. 6-7.

³ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980, hal. 48.

Sebuah negara memerlukan dasar yang dijadikan sebagai sumber kebijaksanaan dalam menyelenggarakan negara. Untuk itu, para pendiri bangsa melakukan kontemplasi dan perdebatan yang sangat serius untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi yang dapat mengakomodasi seluruh entitas yang ada dan menempatkannya secara sama di hadapan negara. Perdebatan itu secara resmi terjadi dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Jika didasarkan kepada orientasi ideologisnya, secara umum, terdapat tiga kelompok di dalamnya, yakni kelompok nasionalis, Islam, dan Marxis. Namun, karena jumlah yang tidak signifikan, kalangan Marxis kemudian bergabung dengan kalangan nasionalis. Yang pertama menginginkan Indonesia merdeka dikonstruksi sebagai negara-bangsa (*nation state*) dan yang kedua menginginkan negara-Islam (*Islamic state*).⁴

Kelompok pertama, dimotori oleh Soekarno dkk menawarkan gagasan negara-bangsa berdasarkan Pancasila. Namun, oleh kalangan Islam yang dimotori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari ormas Islam NU (Wachid Hasyim) dan Muhammadiyah (Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Mudzakkir) nasionalisme adalah paham sekuler dan tidak cocok bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Karena itu, konsepsi negara-Islam yang mereka perjuangkan mengalami dinamika yang sangat intensif dengan konsepsi negara-bangsa berdasarkan Pancasila. Karena tidak terjadi kesepakatan, maka kalangan Islam kemudian menurunkan tuntutan menjadi “Islam sebagai dasar negara”. Dan karena juga tidak mendapatkan persetujuan, maka kelompok Islam kembali menurunkan tuntutan menjadi “Piagam Jakarta”, yang di dalamnya terdapat tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Piagam Jakarta sebenarnya sudah menjadi kesepakatan. Namun,

⁴ Istilah nasionalis dan Islam sesungguhnya disebabkan oleh orientasi kepada konstruksi negara itu. Banyak kalangan tidak tepat dalam memahami konteks ini, sehingga memahami nasionalisme hanya sebagai paham cinta tanah air yang lebih dekat dengan konsep patriotisme. Kesalahan dalam memahami konteks ini berimplikasi kepada pandangan bahwa kalangan Islam adalah kalangan yang tidak cinta tanah air. Padahal kedua kalangan ini memiliki perasaan cinta tanah air yang sama. Hanya saja mereka memiliki perbedaan perspektif tentang konstruksi negara untuk Indonesia merdeka.

kemudian ada informasi bahwa kelompok Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia, karena memandang tujuh kata tersebut sebagai diskriminasi. Inilah yang kemudian membuat tokoh-tokoh dari kalangan Islam kemudian menerima Pancasila tanpa tujuh kata tersebut. Kalangan Islam dapat menerima itu, terutama karena janji Soekarno bahwa dasar negara akan dibicarakan kembali pada saat Indonesia sudah merdeka dan berada dalam situasi yang tenang dan kondusif. Soekarno berhasil meyakinkan para tokoh Islam bahwa orientasi terbesar saat itu adalah kemerdekaan dari penjajahan.

Pada masa awal kemerdekaan, perspektif yang mendikotomikan antara Pancasila dengan Islam terasa sangat kuat. Kalangan Islam mengkonsolidasikan kekuatan politik melalui Partai Masyumi. Dan sesuai dengan janji Soekarno, perdebatan ideologis mengenai dasar negara dilanjutkan kembali dalam Dewan Konstituante. Dalam lembaga ini, kalangan yang menginginkan Islam sebagai dasar formal negara Indonesia kembali melakukan perjuangan konstitusional. Namun, perjuangan itu tidak berhasil, karena Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang salah satu amanatnya adalah membubarkan Dewan Konstituante.

Bagi kalangan Islam, ini bukan merupakan akhir perjuangan. Mereka terus berusaha untuk menjadikan Islam sebagai dasar formal bagi negara Indonesia. Namun, mereka mengalami hambatan besar karena rezim Soekarno terlalu kuat.

Kalangan Islam kembali memperoleh harapan ketiga terjadi pergantian rezim di bawah Presiden Soeharto. Namun, Presiden Soeharto memiliki ideologi politik yang sama dengan Soekarno dalam hal dasar negara. Bahkan pada tahun 1985 Soeharto mengambil jalan lebih tegas lagi dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan penerapan asas tunggal ini awalnya menimbulkan penentangan yang sangat kuat dari kalangan Islam. Namun, tak lama setelah itu, lahir kalangan aktivis Islam yang berhasil mengkonstruksi pemahaman teologis baru bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara Pancasila dengan Islam. Paradigma baru ini membuat Pancasila

menjadi semakin membumi dan dapat diterima secara lebih luas di kalangan umat Islam. Itu terbukti ketika pada tahun 1998 terjadi reformasi yang menjadi akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berimplikasi juga kepada tidak berlakunya lagi kebijakan tentang asas tunggal Pancasila, kalangan Islam dominan, terutama yang berasal dari NU dan Muhammadiyah justru mendirikan partai politik yang berorientasi kebangsaan. Abdurrahman Wachid yang saat itu masih menjadi Ketua Umum PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Amien Rais, tokoh reformasi yang saat itu adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah menggagas Partai Amanat Bangsa (PAB) yang karena kalah voting dalam penentuan nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, kata “bangsa” dan “nasional” hanya masalah transliterasi, karena makna dan orientasinya sesungguhnya adalah sama, yakni kebangsaan. Dalam konteks ini, sesungguhnya telah terjadi pergeseran gagasan di kalangan Islam yang dominan di Indonesia, bahwa Pancasila tidak perlu dikontradiksikan lagi dengan Islam dan tentu saja agama-agama lainnya.

Selain itu, dalam konteks globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas⁵ dan di dalamnya terdapat agenda penjajahan kembali negara-negara Barat dan Eropa, Pancasila menjadi semakin relevan untuk diterapkan secara konsisten. Dalam konteks historis, rasionalitas, dan aktualitas, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi negara-bangsa Indonesia. Dalam konteks kekinian, aktualitas nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk menjaga negara Indonesia dari kejahatan neokolonialisme.

Negara-negara Barat dan Eropa terdorong untuk melakukan penjajahan dan eksploitasi terhadap negara-bangsa lain disebabkan oleh dua hal. Pertama, pandangan menuhankan materi. Salah satu prinsip penting dalam kapitalisme adalah ketersediaan waktu luang atau senggang untuk menikmati hidup dengan melakukan konsumsi tingkat tinggi. Karena itulah, kaum kapitalis menjadikan akumulasi kapital untuk

⁵ Lihat juga Budi Winarno, *Pertarungan Negara VS Pasar*, Yogyakarta: Media Press-indo, 2009, hal. 228.

bisa mempertahankan ketersediaan waktu luang dan bahan konsumsi sebagai tujuan hidup. Dan untuk mewujudkan itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengakumulasi kapital dan memenuhi ketersediaan barang-barang konsumsi dengan segala macam cara, termasuk dengan mengambilnya dari negara-negara jajahan.

Kedua, pandangan bahwa masyarakat Barat dengan ras kulit putih sebagai manusia superior dan menganggap bahwa warga negara lain dengan ras kulit berwarna lebih rendah. Ini dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin dalam biologi yang melahirkan pandangan bahwa manusia berasal dari kera. Teori ini kemudian berpengaruh kepada teori sosial yang melahirkan Darwinisme sosial. Inilah yang kemudian melahirkan perspektif bahwa ras kulit putih adalah mereka yang berevolusi secara sempurna. Sementara ras kulit berwarna adalah mereka yang mengalami evolusi secara tidak sempurna.⁶ Dengan kata lain, masyarakat ras kulit berwarna adalah masyarakat yang masih dekat kekerabatannya dengan gorila. Itulah yang menyebabkan sebagian masyarakat Barat sering bertindak kurang manusiawi terhadap masyarakat kulit berwarna, salah satunya dengan merebut hak-hak mereka dengan kolonialisme. Tindakan mereka kini dilanjutkan dengan cara baru yang disebut dengan neokolonialisme/neoliberalisme.

Dalam konteks ini, pandangan Soekarno tentang neokolonialisme sebagaimana disitir oleh Mahathir Muhammad perlu mendapatkan perhatian intensif. Dalam sebuah pidato yang disampaikan pada 3 Mei 2006, Dr. Mahathir Muhammad mengatakan:

“Neo-colonialism is not a fancy term coined by President Sukarno. It is real. We feel it as we come under the control of agencies owned by our former colonial masters.”⁷

⁶ Steve Olson *Mapping Human History: Discovering the Past Through Our Genes*, New York: 2003.

⁷ “Neokolonialisme bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Sukarno. Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada di bawah kontrol agen-agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita.” *South Bulletin* 124, 15 Mei 2006, hal. 242. Lihat juga Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa. Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hal. 19.

UUD NRI tahun 1945 harus senantiasa mencerminkan semangat Pancasila. Jika terjadi amandemen konstitusi jangan sampai membuatnya menjadi melenceng dari nilai-nilai luhur bangsa. Ketercerabutan konstitusi dari semangat dari dasar negara Pancasila akan menjadi pintu gerbang bagi kembalinya praktik penjajahan dalam bentuk-bentuk baru yang implikasinya lebih membahayakan.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, baik di laut, darat, maupun perut bumi. Namun, kekayaan itu belum memiliki arti signifikan untuk membuat warganya memperoleh kemakmuran. Bahkan dalam beberapa kasus, kekayaan yang sesungguhnya merupakan berkah, dan karena itu awalnya memunculkan impian kelimpahan, justru menjadi “kutukan”. Dikatakan sebagai kutukan, karena kelimpahan SDA itu justru menyebabkan pihak-pihak asing—termasuk yang dulu pernah menjajah, kembali—datang untuk mengeksploitasi dan cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan SDA yang melimpah itu adalah menindas penduduk pribumi.⁸ Akibatnya, Indonesia menjadi negara kaya yang miskin. SDA-nya melimpah, tetapi penduduknya bergelut dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Sebuah *contradictio in terminis*, tetapi begitulah kenyataannya. Naifnya lagi, setiap bentuk sikap nasionalisme—yang terkadang ditunjukkan dengan cara ekstrem berupa perlawanan—terhadap penjajahan yang nyata itu sering disebut sebagai terorisme.

Perspektif ini diajukan oleh Chomsky dalam pendahuluan buku *Pirates and Emperors International Terrorism in The Real World*. Chomsky mengutip cerita St Agustinus tentang seorang bajak laut yang tertangkap oleh Alexander Agung. Antara keduanya kemudian terjadi dialog sebagai berikut:⁹

“Mengapa kamu berani mengacau lautan?”, tanya Alexander.
“Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia?”, jawab si bajak laut tak mau begitu saja dianggap pihak yang paling

⁸ Uraian mengenai kutukan sumber daya alam ini diuraikan dengan sangat baik oleh Joseph E Stiglitz dkk. Lihat Joseph E Stiglitz, Macartan Humphreys, & Jeffrey D. Sachs, *Escaping the Resource Curse*, New York: Columbia University Press, 2007.

⁹ Lihat Noam Chomsky, *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World*, New York: Claremont Research & Publications, 1986.

bersalah, “Apakah hanya karena aku melakukannya dengan perahu kecil, aku kau sebut sebagai bajak laut. Sedangkan kau, karena melakukannya dengan kapal besar, maka kau layak disebut kaisar.” Jawaban bajak laut ini benar-benar sangat menohok Alexander. Cerita St Agustinus ini seharusnya memberikan penyadaran bahwa sebuah kata bisa dibentuk dan bahkan diputarbalikkan maknanya dan terutama oleh para penguasa. Bahkan sebuah tindakan, biadab dan tidaknya tindakan itu di mata publik tergantung bagaimana pelakunya melakukan pembangunan opini kepada masyarakat. Cara-cara seperti inilah yang digunakan oleh AS dan sekutu-sekutunya untuk mencari legitimasi dalam menghancurkan negara-negara yang dianggap atau bahkan baru sekadar berpotensi menjadi musuhnya.

Penutup

Kebhinnekaan merupakan kodrat Tuhan yang harus disikapi dengan bijaksana. Kebhinnekaan sebagai hukum alam itu bukanlah alasan untuk menempatkan yang satu lebih tinggi di atas yang lain, sehingga dapat melahirkan superioritas dan inferioritas. Inilah penyikapan yang tepat agar dapat terbangun sebuah konstruksi negara yang menempatkan seluruh warga negara secara sama. Konstruksi NKRI sebagai sebuah negara-bangsa berdasarkan Pancasila sesungguhnya konstruksi negara-bangsa yang religius yang menggali religiusitas dari seluruh agama yang diakui oleh negara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai luhur unik yang jika diderivasikan secara operasional dapat menjaga negara-bangsa ini dari gerusan budaya dan penjajahan negara-negara lain yang ingin kembali melakukan penjajahan dalam bentuk-bentuk baru.

Generasi baru perlu memahami historisitas empat pilar kebangsaan tersebut secara tepat, sehingga dapat menerima rasionalitasnya sebagai pilihan terbaik bagi Indonesia dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai luhurnya sebagai penjaga negara-bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan, baik oleh negara lain maupun oleh elite penyelenggara negara sendiri. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*